



KEPUTUSAN PERBEKEL SUBAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SUBAYA

PERBEKEL SUBAYA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Nama_Desa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL SUBAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SUBAYA

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Subaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ;

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Subaya dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Perbekel Subaya melalui TP PKK Desa; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Perbekel, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Perbekel Subaya;

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Perbekel Subaya

- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel Subaya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Subaya Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel Subaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u b a y a
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

Plh Perbekel Subaya

NYOMAN BUDIARTA.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SUBAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM DESA SUBAYA

PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SUBAYA :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Nyoman Budiarta	Perbekel	Pembina
2.	I Wayan Meliun	Ketua BPD	Pembina
3.	I Ketut Suar	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Nyoman Arka Sandi	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	PARALEGAL		
6	I Ketut Sugita	Desa Subaya	Ketua
7.	I Putu Sarjana	Desa Subaya	Anggota
8.	I Ketut Rapet	Desa Subaya	Anggota
9.	Ni Ketut Wantari	Desa Subaya	Anggota
10	Ni Cening Guplek	Desa Subaya	Anggota

Pih. Perbekel Subaya

I NYOMAN BUDIARTA.